PEMBACAAN PRODUK HUKUM ISLAM: OTORITAS, *TAQLĪD*, DAN *IJTIHĀD* DALAM PANDANGAN WAEEL B. HALLAQ

Farida Ulvi Na'imah
Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto
Email: Faridaulvi@yahoo.com,

ABSTRACT

This paper outlines the theory of the development of Islamic law products that are not free from authority, taklid and ijihad of each Muslim intellectual across the ages. Wael B. Hallaq is one of the thinkers who concentrates in the field of Islamic law which focuses on power and science. In his book entitled "Authority, Continuity, and Change in Islamic Law" Wael B. Hallaq explicitly stated that Islamic law products are not free from political power and interests; therefore the author uses Michel Foucault's approach to reading Wael B. Hallaq's thoughts in several of his works. The authors' findings in his thinking, variety and types of activities in Islamic law are quite contributive to the study of Islamic law. However, the conclusions about the claim that he is a positive element that serves to build loyalty and commitment to study the school, give rise to a defensive attitude towards other schools of thought is irrelevant when viewed from the modernist point of view. Because taklid, besides building the authority of the school, is also responsible for the integration of creativity and progressiveness in Islamic law.

Keywords: Authority, Taklid, Ijtihad and Islamic Law

ABSTRAK

Penelitian ini mengurai tentang teori tentang perkembangan produk hukum Islam yang tidak lepas dari otoritas, taklid dan ijihad masing-masing dari para intelektual muslim lintas masa. Wael B. Hallaq merupakan salah satu pemikir yang berkonsentrasi dalam bidang hukum Islam yang fokus pada kuasa dan ilmu pengetahuan. Dalam bukunya yang berjudul "Authority, Continuity, and Change in Islamic Law" Wael B. Hallaq secara tegas ia menyatakan bahwa produk hukum Islam tidak lepas dari kekuasaan dan kepentingan politik; oleh sebab itu penulis menggunakan pendekatan Michel Foucault untuk membaca pemikiran Wael B. Hallaq dalam beberapa karyanya. Temuan penulis dalam pemikirannya, ragam dan jenis aktivitas dalam hukum Islam cukup kontributif terhadap kajian hukum Islam. Namun, kesimpulannya tentang taklid bahwa ia adalah elemen positif yang berfungsi untuk membangun loyalitas dan komitmen untuk mempelajari mazhab, melahirkan sikap defensif terhadap madhhab-madhhab lainnya tidaklah relevan jika dilihat dari sudut pandang kaum modernis. Sebab taklid selain telah membangun otoritas mazhab, juga bertanggungjawab atas terpasungnya kreatifitas dan progresifitas dalam hukum Islam.

Kata kunci: Otoritas, Taklid, Ijtihad dan Hukum Islam

BIOGRAFI WAEEL B. HALLAQ

Wael B. Hallaq merupakan guru besar di McGill University Kanada. Dia seorang Kristen berdarah Arab dan lahir di Nazaret Palestina pada tahun 1955. Ia menyelesaikan jenjang doktoral pada *University of Washington* pada tahun 1985.¹

¹ (www.wikipedia.com, akses tanggal 25 November 2016)

Sejak tahun 1994 Ia diangkat menjadi guru besar pada almamaternya dan pada tahun 2005 Dia menjabat sebagai guru besar di *McGill University*. Dia adalah seorang pemikir dan penulis yang produktif dalam menghasilkan karya-karya di bidang *Islamic Studies*, terutama hukum Islam. Sampai tahun 2008, dia telah menyusun delapan buku tentang hukum Islam yang meliputi aspek sejarah, otoritas (doktrin), analisis terhadap pemikiran tokoh dan berbagai aspek lainnya.

Hallaq merupakan orientalis yang datang membawa gelombang baru dalam studi hukum Islam. Pendapat-pendapatnya dinilai sangat simpatik terhadap Islam. Ia misalnya secara eksplisit menyatakan bahwa beberapa karya intelektual yang Ia susun adalah dalam rangka membentuk kutub baru dan sebagai anti tesis atas kekeliruan pandangan beberapa orientalis sebelumnya. Buku ini merupakan satu dari triloginya (*A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to Sunnī Usūl al-fiqh, Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, dan *The Origins and Evolution of Islamic Law*). Di dalamnya Ia mengelaborasi kitab-kitab *ṭabaqāt* sebagai dokumen yang menceritakan hirarki otoritas fuqaha pada masing-masing madhhab fikih. Sumbangsih pemikirannya pada buku itu adalah pernyataannya bahwa taklid adalah salah satu bentuk ijtihad kreatif yang dilakukan para fuqaha pada era setelah abad IV H. Melalui karyanya tersebut Ia ingin mengatakan bahwa teori pintu ijtihad yang telah dan pernah tertutup lama tidaklah memiliki landasan analitis yang kuat. Karyanya yang berjudul *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*, menjadi antitesis untuk teori sebelumnya bahwa klaim tertutupnya pintu ijtihad dan kejumudan fikih Islam adalah klaim yang sama sekali tidak benar. Menurutnya, kitab-kitab *ṭabaqāt* merupakan rekaman yang menunjukkan adanya sisi progresifitas dan kreatifitas fikih Islam.

Masa yang terbentang dari sejak zaman nabi sampai pertengahan abad IV H disebut dengan periode pembentukan (*formative periode*). Pada masa itu fikih Islam telah berada dalam titik mapan, di mana berbagai kecenderungan berijtihad muncul sehingga muncul pula bermacam-macam madhhab. Pada periode awal Islam berdiri berbagai macam madhhab fikih, bukan hanya empat madhhab yang kita kenal saat ini. Tapi karena beberapa faktor hanya empat madhhab saja yang tersisa dan bertahan. Memasuki abad V H, empat madhhab fikih yang ada memasuki fase kristalisasi yang ditandai dengan lahirnya kitab-kitab *ṭabaqāt*. Kitab-kitab tersebut menyusun hirarki

tokoh-tokoh madhhab berdasarkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam menyelesaikan kasus fikih partikular (*juziyyat*) dan kemampuan berinteraksi langsung dengan teks al-Quran dan Sunah.

Bab I buku ini membahas tentang struktur hirarkis ulama fiqh / *Jurist* (*Ṭabaqāt*) dalam tiga madhhab. Tipologisasi ini disusun atas konteks sejarah dan kondisi sosial tertentu. Dari Madhhab Mālikī, Ibn Rushd pertama kali mengklasifikasi tingkatan mufti menjadi tiga yang didasarkan atas kemampuan mereka dalam menggali hukum dari sumber aslinya. Dari madhhab Shāfi‘ī, Ibn Ṣalāḥ mengklasifikasi tingkatan mufti menjadi enam yang terbagi atas dua kategori, dan Ibn Kamāl dari madhhab Ḥanbali mengklasifikasi tingkatan mufti menjadi tujuh.

Bab II membahas tentang ijtihad pada masa periode pembentukan (*formative periode*) yang dimulai dari masa Imam Madhhab dan sesudahnya. Otoritas Mujtahid dibangun guna menjaga keberlangsungan eksistensi madhhab tersebut.

Bab III membahas tentang kemunculan dan bertahannya otoritas sebuah madhhab. Para pendiri madhhab (*mujtahid muṭlaq*) tidak selalu melakukan ijtihād di berbagai permasalahan, otoritas mereka justru dibangun oleh murid muridnya yang menanamkan beberapa doktrin. Misal al Muzannī, seorang murid Imām Shāfi‘ī yang memiliki kapasitas yang sama dengan gurunya namun tidak mendirikan madhhab sendiri.

Bab IV membahas tentang *taqlīd*: otoritas, penafsiran (*hermeneutik*) dan fungsinya. *Taqlīd* awalnya bermakna mengikuti pendapat terdahulu baik aqwāl ataupun metodenya. Namun menurut Hallaq, *taqlīd* tetap mungkin dilakukan oleh seorang yang memiliki kapasitas ijtihād sekalipun.

Bab V membahas tentang dinamika doktrin hukum, dan bab terakhir membahas tentang para ahli hukum (mufti), pembuat hukum (*mujtahid, mujaddid*) dan perubahan (ijtihād) hukum.

TIPOLOGI *FUQAHA’ AL MADHAHIB*

Tipologisasi ulama diperlukan guna mengetahui elemen pembentuk yang ada dalam tradisi setiap madhhab dan proses transformasi otoritas dari satu tingkatan ke tingkatan lainnya (hal. 1). Hallaq mengeksplorasi tiga dari empat madhhab yang populer di kalangan umat Islam. Ia tidak menganalisis *ṭabaqāt* dari madhhab Ḥanbali

karena Imam Ahmad bin Hanbal pendiri madhhab tersebut menurutnya lebih menonjol sisi hadisnya daripada sisi fikihnya.

1. Madhhab Mālikī

Tokoh yang pertama kali menyusun tipologi ulama dalam Madhhab Mālikī adalah Muḥammad Ibn Rushd. Selanjutnya, tipologisasi Ibn Rushd melahirkan pengaruh terhadap *framework* fikih sesudahnya. Ibn Rushd membagi ahli fikih menjadi: (hal. 3)

- 1) golongan yang menerima ajaran madhhab Maliki tanpa disertai pengetahuan dari mana pendapat itu diambil (*muqallid*). Kapasitas orang yang berada pada level ini adalah menghafal *aqwāl* Imam Mālik dan sahabat sahabatnya, tanpa mengerti makna yang ia hafalkan dan tanpa adanya kemampuan membedakan mana diantara pendapat pendapat tersebut yang benar dan mana yang salah. Golongan ini tidak berhak mengeluarkan fatwa karena mereka hanya taklid. Ulama dalam strata ini tetap diperbolehkan mengamalkan ilmu yang mereka miliki dengan syarat tidak ada orang yang lebih kapasitasnya untuk dimintai fatwa. Pada kondisi demikian, para *muqallid* juga boleh pendapatnya diikuti oleh orang lain dengan syarat mereka berfatwa dengan pendapat yang sudah ada dalam madhhab Mālik. Akan tetapi, ketika mereka dihadapkan pada kondisi di mana dalam madhhab Mālik terjadi perbedaan pendapat, maka:
 - a) Ia dibebaskan untuk memilih pendapat yang mana saja.
 - b) Ia berijtihad (mencari kebenaran) dari sekian pendapat yang ada.
 - c) Memilih pendapat yang paling berat
- 2) golongan orang yang mampu menghafal seluruh *aqwāl* dalam madhhab Mālikī, memahami maknanya, mengerti dan mampu membedakan mana pendapat yang benar dan mana pendapat yang salah, akan tetapi mereka lemah dalam melakukan ijtihad langsung dari sumber aslinya. Golongan ini diperbolehkan berfatwa sesuai kapasitas mereka. Akan tetapi jika mereka dihadapkan pada permasalahan yang tidak ada jawabannya dalam madhhab Mālik, mereka tidak diperbolehkan ijtihād.

- 3) golongan orang yang menghafal *aqwāl* dalam madhhab Mālikī, faham maknanya, mengerti dan bisa membedakan pendapat yang benar dan pendapat yang salah, dan sampai pada derajat mumpuni berijtihad secara langsung dari teks. Golongan ini memiliki pengetahuan tentang seluk beluk ayat-ayat *nāsikh-mansūkh*, umum-khusus, *muḥkam-mutashābih* dan hafal banyak hadis. Golongan ini diperbolehkan mengeluarkan fatwa dengan melakukan ijtihād dan analogi (*qiyās*) dari sumber aslinya.

2. Madhhab Shāfi’ī

Dalam madhhab Shāfi’ī, Abū ‘Amr Uthmān Ibn as Ṣalāḥ (w. 643 H/1245 M), merupakan penyusun pertama tipologi mujtahid dalam madhhab Shāfi’ī. Pada periode ini (abad VII H), Ibn Ṣalāḥ mengklasifikasikan jenis mufti ke dalam 2 macam, yaitu: (hal. 8 - 12)

1) *Mustaqill* (muṭlaq)

Seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang usul fikih, tafsir, hadis, *nāsikh-mansūkh*, bahasa Arab, memiliki kemampuan untuk meng-*istinbāṭ*-kan hukum langsung dari al-Quran dan hadis. Kategori pertama ini dikhususkan untuk pendiri madhhab, yaitu Imam Shāfi’ī.

2) *Ḡair mustaqill*

yaitu seseorang yang memiliki semua persyaratan *mustaqill* secara sempurna, namun ia mengikuti metode dan sistem ijtihad yang telah ditetapkan Imam madhhabnya sekalipun keputusan akhir yang didapatkan tidak sama dengan Imam madhhabnya, khususnya dalam masalah *furū’iyyah*. Ia disebut juga dengan *muntasib*. Ada empat kategori *mufti muntasib* ini:

- a) mujtahid yang memiliki kapasitas sama seperti Imam madhhab namun mereka mengambil perkara yang sudah diformulasikan oleh pendiri madhhab. Mereka ini terlepas dari taqlīd. Misalnya Al Muzannī (w. 264 H/ 877 M) dan Ibn Suraij (w. 306 H).
- b) mujtahid *muqayyad / aṣḥāb al wujūh wa at-ṭurūq*

yaitu mujtahid yang memiliki kemampuan untuk mengkonfirmasi kebenaran pendapat dalam madhhab, mendalami ilmu fiqh dan *uṣūl al fiqh*, menguasai pola analogi (*qiyās*) akan tetapi tidak keluar dari kemampuan imam madhhab dan dalil serta metode yang digunakan madhhab Shāfi'ī. Mujtahid pada peringkat ini jelas tidak terlepas dari taklid terhadap Imam madhhabnya, sebab beberapa variable ijtihad mutlak seperti penguasaan hadis dan bahasa Arab tidak mereka miliki sempurna.

- c) mujtahid yang memiliki kemampuan menghafal *aqwāl* dalam madhhab disertai dalil-dalilnya, mampu melakukan konfirmasi, klarifikasi, klasifikasi, mempertahankan, dan mencari pendapat terkuat, akan tetapi mereka tidak sampai pada tingkatan derajat *aṣḥāb al wujūh wa at-ṭurūq*. Kontribusi mereka cukup besar yaitu mereka mampu mengelaborasi hukum secara detail dan mampu melakukan penalaran untuk mencari status hukum untuk kasus yang baru mereka temui sesuai prinsip yang berlaku dalam madhhab Shāfi'ī. Mereka adalah generasi *mutaakhirīn*, yaitu generasi yang hidup akhir abad IV H termasuk di dalamnya Ibn Ṣalāḥ sendiri. Kontribusi mereka cukup besar yaitu mampu mengelaborasi hukum secara detail dan mampu melakukan penalaran untuk mencari status hukum kasus-kasus yang baru mereka temui sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam madhhab Shāfi'ī.
- d) mujtahid periwayat pendapat madhhab. Kemampuan mereka mampu memahami permasalahan dan mengerti jawabannya, tetapi mereka tidak mengerti perolehan dalilnya serta tidak mampu melakukan analogi, sehingga hak berfatwanya hanya sebatas mentranmisikan apa yang sudah secara formal menjadi pendapat resmi madhhab. Jika tidak ada dalam teks resmi madhhab, dan masih berada pada tahap sederhana, mereka diizinkan untuk melakukan penalaran sesuai dengan prinsip madhhab Shāfi'ī. Namun, jika kasus yang dihadapi

cukup rumit dan tidak diketemukan kaidah dalam madhhab, mereka tidak diperbolehkan berfatwa.

Ada kategori mufti *kelima* dari *mujtahid muntasib* yang dibuat oleh Ibn Ṣalāḥ secara non-formal, yaitu orang yang baru membaca dan memahami satu atau lebih kitab fikih, akan tetapi tidak termasuk kepada empat kategori sebelumnya. Jika suatu saat seorang awam meminta fatwa kepadanya mengenai hukum suatu permasalahan, ia dibolehkan untuk berfatwa jika tidak ada orang lain di negeri itu selain dia. Pada kasus ini orang awam dianggap bertaklid dengan imam, bukan bertaklid dengan si mufti. Jika mufti *muqallid* ini tidak menemukan jawaban terhadap kasus dari buku yang ia baca, ia tidak diperkenankan untuk melakukan analogi terhadap kasus-kasus dalam madhhab.

3. Madhhab Ḥanafī

Tiga abad setelah periode Ibn Ṣalāḥ, seorang fakih dari dinasti Utsmaniyah Turki, Aḥmad bin Kamal Pashazadeh (w. 940 H/1533 M) menyusun tipologi para *fuqahā'* dalam madhhab Ḥanafī. Menurutny ada tujuh tingkatan *fuqahā'* dalam madhhab Ḥanafī (hal 14-17).

- 1) *mujtahid fī al-shar'i* seperti empat Imam pendiri madhhab. Mereka adalah orang yang membangun metodologi pengambilan hukum tanpa ber-taklid pada siapapun.
- 2) *mujtahid fī al madhhab* seperti murid Abū Ḥanīfah yaitu Abū Yusūf, Aḥmad bin Zufar, dan Muḥammad as-Shaybanī. Mereka mampu berijtihad dari sumber aslinya, sekalipun dari beberapa kasus fiqh mereka berbeda pendapat dengan imam madhhab, mereka tetap mengikuti metodologi yang sudah dirumuskan Imam madhhab.
- 3) *mujtahid fī masā'il* seperti al-Khaṣṣaf (w. 261 H/874 M), Abū Ḥasan al-Karkhī (w. 340 H/951 M), al-Ṭaḥāwī (w. 321 H/933 M), al-Ḥulwānī (. 456 H/1063 M), al-Sarakhsī (w. 483/1090), al-Bazdawī (w. 482 H/1089 M), dan Fakhr ad Dīn Qāḍīkhān (w. 592 H/1195 M). Mereka tidak bisa keluar dari batasan madhhab Ḥanafī, baik pada masalah *furū'* (cabang)

ataupun *uṣūl*, akan tetapi mereka mampu menderivasi hukum sesuai kaidah yang telah ditetapkan dalam madhhab.

- 4) *aṣḥāb al- takhrīj* seperti Aḥmad Husām ad Dīn ar-Rāzī (w. 593/1196). *Jurist* pada tingkatan ini tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad, tetapi tingkat intelektual mereka mampu memperinci (*tafṣīl*) pendapat yang umum (*mujmal*) dalam madhhab. Memecahkan ambiguitas (*muhtamal*) dalam pendapat madhhab dan melakukan analogi (*muqāyasah*) permasalahan kasus baru dengan kasus yang pernah ditulis dalam madhhab Ḥanafī.
- 5) *aṣḥāb al- tarjīḥ* seperti Abū al Ḥasan al-Qudūrī (w. 428 H/1036 M). Kemampuan mereka adalah memilih pendapat dalam madhhab, mana yang riwayatnya lebih valid, mana yang benar dan mana yang konsisten dengan metode *qiyās*.
- 6) *muqallid* yang kemampuan mereka adalah membedakan pendapat antara yang paling kuat, kuat dan lemah, seperti Aḥmad Fakhr ad Dīn Ibn al-Faṣīḥ (w. 680 H/1281 M), al-Mūṣilī (w. 683 H/1284 M) dan al-Maḥbūbī (w. 747 H/1346 M).
- 7) *muqallid* tingkat terendah, yaitu mereka yang tidak mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh enam tingkatan di atasnya, tidak bisa membedakan kanan-kiri dan tidak mengerti mana utara mana selatan.

Setelah mendeskripsikan tipologisasi di atas, Hallaq memulai analisisnya dengan menunjukkan anomali pada tipologi Madhhab Mālik yang berbeda dengan madhhab Shāfi'ī dan Ḥanafī, tipologi yang dibuat oleh Ibn Rushd ini disusun dengan skema terbalik dikarenakan tipologi Ibn Rushd ditulis lebih awal dari tipologi-tipologi lain. Tipologisasi ini menunjukkan bahwa loyalitas dan fanatisme terhadap madhhab belum mengental seperti yang terjadi 1 abad kemudian di era Ibn Ṣalāḥ dan 3 abad kemudian di era Ibn Kamāl. Detailitas dalam penyusunan tipologi pada karya Ibn Ṣalāḥ dan Ibn Kamāl sangat dominan dikarenakan dua hal. *Pertama*, mereka menulis karyanya tersebut 2,5 abad setelah berdirinya madhhab Shāfi'ī, di mana perkembangan madhhab dalam sejarah sudah bisa diamati secara jelas. *Kedua*, kesadaran mengenai pentingnya struktur otoritas dan adanya evolusi hukum Islam telah muncul pada diri

Ibn Ṣalāḥ dan Ibn Kamāl. Dengan demikian, pola tipologisasi hirarkis seperti yang digunakan oleh Ibn Ṣalāḥ dan Ibn Kamāl adalah dalam rangka untuk mendeskripsikan, membenarkan dan merasionalisasikan segala jenis aktivitas fikih di masa lalu.

Dari tipologi tiga madhhab tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa, *pertama*, tipologisasi itu berguna untuk mendeskripsikan beragam aktivitas fikih yang ada pada masa kemunculannya. *Kedua*, konsekuensi dari tipologisasi adalah ditemukannya uraian mengenai jenis aktivitas fikih dan tugas seorang mufti. Hallaq menyimpulkan bahwa ada lima lapisan aktivitas fikih, yaitu *ijtihād*, *takhrīj*, *tarjīḥ*, *taqlīd* dan *taṣnīf*. Tidak ada dari lima fungsi ini yang berdiri secara independen. Oleh karena itu, seorang *muqallid* bisa menjadi seorang mufti, seorang mujtahid *muqayyad* bisa menjadi *muṣannif*, seorang *mukharrij* bisa menjadi seorang mujtahid dan seterusnya. Seorang mujtahid (kecuali Imam pendiri madhhab) bisa pula menjadi seorang *muqallid* dan tentunya seorang mufti. (hal. 23).

IJTIHĀD SEBAGAI EKSISTENSI SEBUAH MADHHAB

Imam madhhab fikih yang paling senior, Abū Ḥanīfah, merupakan murid dari Ḥammād ibn Abī Sulaymān. Ḥammād sendiri merupakan murid dari Ibrāhīm al-Nakhaʿī, yang merupakan murid dari Anas ibn Maʿlik, Aʿisyah binti Abū Bakr, dan Ibn Masʿūd; yang ketiganya mendapatkan ilmu dari Rasulullah sendiri. Dari silsilah keilmuan ini, dapat disimpulkan bahwa Abu Hanifah merupakan *tābiʾ al-tābiʾīn*, karena ia menuntut ilmu dari Ḥammād dan al-Nakhaʿī, yang merupakan *tābiʾīn*. Sementara itu, Anas ibn Mālik dan Ibn Masʿūd merupakan sahabat Rasulullah. Ajaran-ajaran fikih Abū Ḥanīfah sendiri diketahui dari tulisan beberapa muridnya yang terkemuka seperti Abū Yusūf dan al-Shaybanī. Dalam *Atsar*-nya, Abū Yusūf menulis hadis-hadis yang ia dapatkan dari Abū Ḥanīfah tanpa penjelasan, penafsiran, ataupun pemikiran pribadi dari Abū Yusūf sendiri. Pemikiran pribadi ini baru tampak dalam kitab *Muṣannaf* yang ditulis oleh al-Shaybanī.

Selanjutnya, al-Shaybanī memiliki murid yaitu Muḥammad ibn Idrīs al-Shāfiʿī. Selain menimba ilmu dari al-Shaybanī, al-Shāfiʿī juga tercatat sebagai murid imam maddhab fikih yang lain, yaitu Mālik ibn Anas. Al-Shāfiʿī sendiri, kemudian merumuskan pemikiran fikihnya dalam kitab *al-Umm*. Dalam kitab ini, al-Shāfiʿī tidak hanya menulis penjelasan-penjelasan guru-gurunya, melainkan juga menulis ijtihād

hukumnya sendiri yang berbeda dengan hasil ijtihad guru-gurunya. Lebih jauh, al-Shāfi‘ī tidak hanya berhasil menulis *sharḥ* terhadap fatwa guru-gurunya, melainkan ia juga berhasil merumuskan suatu teori penalaran hukum (*uṣūl al-fiqh*).

Sharḥ yang mereka tulis merupakan pemikiran (ijtihād) orisinil yang boleh jadi sama dengan hasil pemikiran gurunya atau boleh jadi berbeda dan benar-benar baru. Dengan kata lain, *sharḥ* yang ditulis oleh para ulama tidak semata-mata merupakan penjelasan *an sich* dari fatwa atau produk hukum gurunya melainkan juga hasil dari ijtihād mereka sendiri yang semakin sempurna, semakin sistematis, dan dan berpijak pada metodologi yang semakin mapan. Jika menilik dari sejarah madhhab fikih dan membaca dari kitab-kitab hukum primer mereka, akan tampak dengan jelas bahwa sejatinya, masa keempat imam maddhab fikih tersebut, yakni Abū Ḥanīfah, Mālik ibn Anas, Aḥmad ibn Idris al-Shāfi‘ī, serta Aḥmad ibn Ḥanbal disebut sebagai masa formatif madhhab. Sebab di masa ini, fatwa-fatwa hukum para fuqaha tersebut belum sistematis dan belum memiliki suatu metodologi yang mapan. Justru para *fuqahā’* penganut madhhab tersebut yang terus-menerus menyempurnakan metodologi dan doktrin-doktrin hukum madhhab mereka sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam tradisi fikih, sebuah hukum tentang suatu persoalan dalam suatu madhhab merupakan hasil *ijtihād* para mujtahid yang terus-menerus diupayakan dan disempurnakan di setiap zaman. Pada akhirnya, sebuah madhhab tidak dapat eksis hanya dari *ijtihād* seorang faqīh yang membangun madhhab itu semata. Akan tetapi kelangsungan hidup sebuah madhhab juga ditentukan oleh para *fuqahā’* dan para mujtahid di dalam madhhab itu di setiap zaman.

TAQLID: FUNGSINYA DALAM MENTRANSFORMASIKAN OTORITAS MADHHAB

Salah satu elemen penting dari munculnya sebuah madhhab adalah munculnya satu pendapat, teori, dan metodologi yang dibangun oleh seorang tokoh, yang pada gilirannya diikuti oleh masyarakat baik yang semasa ataupun masa-masa berikutnya. Tokoh dimaksud kemudian dikenal sebagai seorang pendiri madhhab. Kuat dan mapannya suatu madhhab yang dibangun juga tidak terlepas dari peran para pemikir dan tokoh masyarakat berikutnya yang diantara mereka dikenal sebagai seorang mufti (*jurist consult*).

Secara lebih kongkret, dalam menghadapi masalah-masalah sosial keagamaan, seorang mufti mencoba menjawabnya dengan cara mencari landasan dari para pemikir sebelumnya yang dipandang mempunyai otoritas keilmuan. Secara sederhana, hal demikian dapat digolongkan pada proses *taqlīd*. Jika proses ini berlangsung secara terus menerus bahkan diikuti oleh mufti-mufti lainnya dan juga masyarakat yang semakin luas, maka lahirlah sebuah madhhab. Dengan demikian, *taqlīd* berperan besar dan positif dalam mempromosikan lahir dan mapannya sebuah madhhab. Pada waktu yang sama, *taqlīd* juga berperan dalam proses keberlanjutan serta stabilitas suatu ajaran atau doktrin, sekaligus membantu mengatasi kebingungan ummat menghadapi pluralitas ajaran atau doktrin. Yang paling gamblang adalah dua jalur utama dalam proses konstruksi otoritas seorang ulama madhhab, yakni jalur *ijtihād* dan *taqlīd*. Keduanya memainkan peranan penting dalam proses konstruksi otoritas ulama madhhab namun dalam tingkatan berbeda. Melalui jalur *ijtihād* dapat dilihat dari kategorisasi *mujtahīd*. Kategorisasi tersebut lahir dari adanya penciptaan poros otoritas yang berpusat pada tokoh yang kemudian dikenal sebagai pendiri (*founder*) madhhab, lalu disebut imam, dan dicirikan sebagai *mujtahīd muṭlaq*. Oleh para muridnya dicantumkan namanya sebagai nama madhhab.

Selain dari kategorisasi tingkatan mujtahid, dikonstruksi pula tingkatan doktrin hukum di mana pendapat seorang pendiri madhhab ditaruh pada posisi pertama dan diikuti dengan pendapat-pendapat muridnya atau ulama-ulama lain yang juga dianggap sebagai tokoh madhhab. Semisal dalam madhhab Ḥanafī ada kategori *Zahir al-Riwayah* atau *Masā'il al-Uṣūl*, yakni pandangan dari tokoh-tokoh madhhab yang mempunyai tingkat otoritas tertinggi seperti sang imam madhhab Abū Ḥanīfah dan para muridnya terutama Abū Yusūf dan Muḥammad Ḥasan al-Shaybanī. Kemudian *Masā'il al-Nawādir*, yaitu kumpulan doktrin yang juga di distribusikan kepada para tokoh madhhab Ḥanafī, namun tanpa persetujuan dari para perawi (*transmitters*) yang berkualifikasi tinggi, dan tidak melalui sejumlah besar jalur transmisi. Selanjutnya *al-Nawāzil* atau *Waqī'āt*, yaitu kasus-kasus yang dibahas oleh para tokoh madhshab awal yang kemudian ditemukan solusinya oleh generasi berikutnya. Selain itu ada pula kasus-kasus baru yang didapati berbagai macam solusinya dengan menggunakan metodologi madhhab Ḥanafī (hal. 47-48).

Adapun melalui jalur *taqlīd*, Hallaq menganggap bahwa *ijtihād* dan *taqlīd* beroperasi secara bersamaan. *Taqlīd* merupakan agen yang memediasikan antara masing-masing otoritas dalam struktur para *mujtahid* dan sebagai perekat loyalitas mereka kepada madhhab maupun sang pendiri madhhab. Sebagai bukti aktifitas *ijtihād* dan *taqlīd* tetap terjaga di dalam madhhab, dapat dilihat dari struktur doktrin suatu mazhab yang mana sistematisasinya tidak terbentuk di masa hidup sang pendiri madhhab, tetapi sebaliknya setelah meninggalnya mereka. Seperti madhhab Ḥanafī yang mana bangunan struktur doktrin hukumnya mengalami perkembangan dari abad ke 2 H/8 M sampai abad ke 6 H/12 M. Di antara murid dan pengikut madhhab Ḥanafī yang memberikan sumbangsih terhadap sistematisasi doktrin madhhab Hanafi adalah Shaybānī (w. 189 H/804 M), Abū Ja‘far al-Ṭahawī (w. 321 H/ 933 M), Abu al-Layth al-Samarqandi (w. 375 H/ 985 M), Abu al-Ḥasan al-Qudūrī (w. 428 H/1036 M), Sarakhsi (w. 490 H/ 1096 M), dan ‘Alā ‘al-Dīn al-Samarqandī.

Taqlīd sesungguhnya tidak pernah ke luar sendiri dari sebuah alur sejarah perkembangan hukum Islam. Ijtihād dan *taqlīd* bukanlah dua hal yang berdiri sendiri secara eksklusif tanpa ada keterhubungan. Yang menarik, *taqlīd* itu sesungguhnya harus dibaca sebagai tahap perkembangan dari masa formatif hukum di mana ijtihād merupakan *intellectual instrument* yang paling otoritatif. *Taqlīd* juga merupakan instrument penetapan hukum mana yang harus diberlakukan. Yang terjadi sesungguhnya adalah hegemoni dan otoritas. Ada masa di mana ijtihād menghegemoni *taqlīd* yaitu pada masa formatif hukum Islam dan ada saat di mana *taqlīd* menghegemoni ijtihād, yakni pada masa post-formative.

Pembacaan terhadap fakta sejarah tersebut memiliki implikasi yang sangat positif terhadap pencitraan perkembangan hukum. *Taqlīd* bukanlah dasar untuk menuduh kurang *qualified*-nya fuqahā’ era post-formative, melainkan upaya menghargai dan melanjutkan apa yang telah dicapai oleh ulama-ulama sebelumnya. Melanjutkan tradisi bukanlah sesuatu yang negatif sepanjang tidak memunculkan persoalan-persoalan yang mengarah pada social disorder. Lebih lanjut, ketika persoalan ijtihād dan *taqlīd* ini didudukkan dalam takaran otoritas, maka sesungguhnya kedua-duanya berada dalam upaya memegang otoritas. Yang pertama adalah masa

pembangunan otoritas hukum Islam dan yang kedua adalah upaya mempertahankan otoritas yang ada. Oleh karena itulah taqlid merupakan upaya terakhir mempertahankan otoritas ini dengan mencantolkan pendapat pada madhhab tertentu.

Tentang taklid, kesimpulan yang diambil Hallaq adalah *pertama*, taklid merupakan komitmen untuk mempelajari doktrin madhhab, mengembangkan atau bahkan melakukan pembelaan terhadapnya. *Kedua*, jika ijtihad selalu dilakukan secara mutlak sama seperti yang dilakukan pendiri madhhab, maka sampai sekarang tidak akan berdiri satu madhhab pun, sebab yang ada hanyalah mujtahid-mujtahid independen. *Ketiga*, taklid-lah yang menjamin keberlangsungan empat madhhab fikih yang sekarang kita kenal. Maka taklid merupakan agen yang diperlukan untuk memediasi otoritas dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Hallaq juga menyimpulkan bahwa perubahan (*change, tajdid*) dalam hukum Islam dilakukan melalui hubungan yang saling mempengaruhi antara ijtihad dan taklid. Oleh karenanya, tuduhan beberapa orientalis dan pembacaan negatif umat Islam terhadap taklid yang selama ini dipertahankan sangat tidak beralasan.

PENUTUP

Kajian Wael B. Hallaq tentang ragam dan jenis aktivitas dalam hukum Islam cukup kontributif terhadap kajian hukum Islam. Namun, kesimpulannya tentang taklid bahwa ia adalah elemen positif yang berfungsi untuk membangun loyalitas dan komitmen untuk mempelajari mazhab, melahirkan sikap defensif terhadap madhhab-madhhab lainnya tidaklah relevan jika dilihat dari sudut pandang kaum modernis. Sebab taklid selain telah membangun otoritas mazhab, juga bertanggungjawab atas terpasungnya kreatifitas dan progresifitas dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Oxford University Press, 1964.
Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
-----, Authority, *Continuity and Change in Islamic Law*, Cambridge. UK: Cambridge University Press, 2004.